

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di wilayah Indonesia secara resmi dijalankan per tanggal 1 januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah bagi pemerintah tertuang dalam UU No.32 tahun 2004 yang selanjutnya digantikan oleh UU No.23 tahun 2014 mengenai hal yang berhubungan dengan pemerintah daerah serta UU No.25 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yang digantikan oleh UU No.33 tahun 2004. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintah dan sistem pembangunan daerah pemerintahan Indonesia yang semula tersentralisasi menjadi desentralisasi yang disebut dengan otonomi daerah.

Penyelenggaraan pemerintah secara desentralisasi berdampak signifikan terhadap pengelolaan keuangannya, sehingga setiap daerah diberikan kewenangan dan wewenang untuk melakukan pengelolaan dan memanfaatkan terkait sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimal selaras dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan No. 23 Tahun 2014, agar memiliki alokasi dana yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang No.34 tahun 2000 digantikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 juga mengadopsi cara terbaik untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, sehingga adanya kesempatan yang cukup luas untuk pengelolaan dan menggali penerimaan dari perihal pendapatan asli daerah.

Dengan adanya kedua UU tersebut, khususnya UU No.2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jelas mengalokasikan tanggung jawab lebih besar terhadap daerah untuk menggali, mengelola, dan meningkatkan pajak daerah bersumber dari potensi daerah masing-masing. Secara umum, menurut teori keuangan daerah, diperkirakan terdapat beberapa faktor atau variabel yang mempengaruhi pertumbuhan pajak daerah. Beberapa variabel tersebut antara lain: Produk Domestik Bruto (PDRB), jumlah wisatawan, destinasi atau objek wisata (Masrizal, 2005).

Perkembangan pariwisata pasti berdampak pada sector lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Terkait bidang ekonomi, pembangunan pariwisata berdampak langsung pada tenaga kerja di bidang pariwisata dan juga pemerintah daerah, sedangkan dampak tidak langsung berupa peningkatan kebutuhan angkutan umum. Perkembangan pariwisata membawa hal positif bagi pemerintah dan masyarakat di bidang pariwisata.

Menurut Salah Wahab yang dikutip dalam bukunya “Manajemen Pariwisata” oleh Nasrul (2010) Pariwisata merupakan jenis industri baru yang dapat menyediakan lapangan kerja, taraf hidup dan merangsang produktivitas lainnya sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat di sektor tersebut. Perkembangan pariwisata akan melahirkan industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata.

Para ahli ekonomi memprediksikan bahwa bidang pariwisata bakal menjadi suatu kegiatan ekonomi yang penting di abad ke-21. Pariwisata sebagai komponen utama pendapatan daerah akan meningkatkan pendapatan daerah, jika

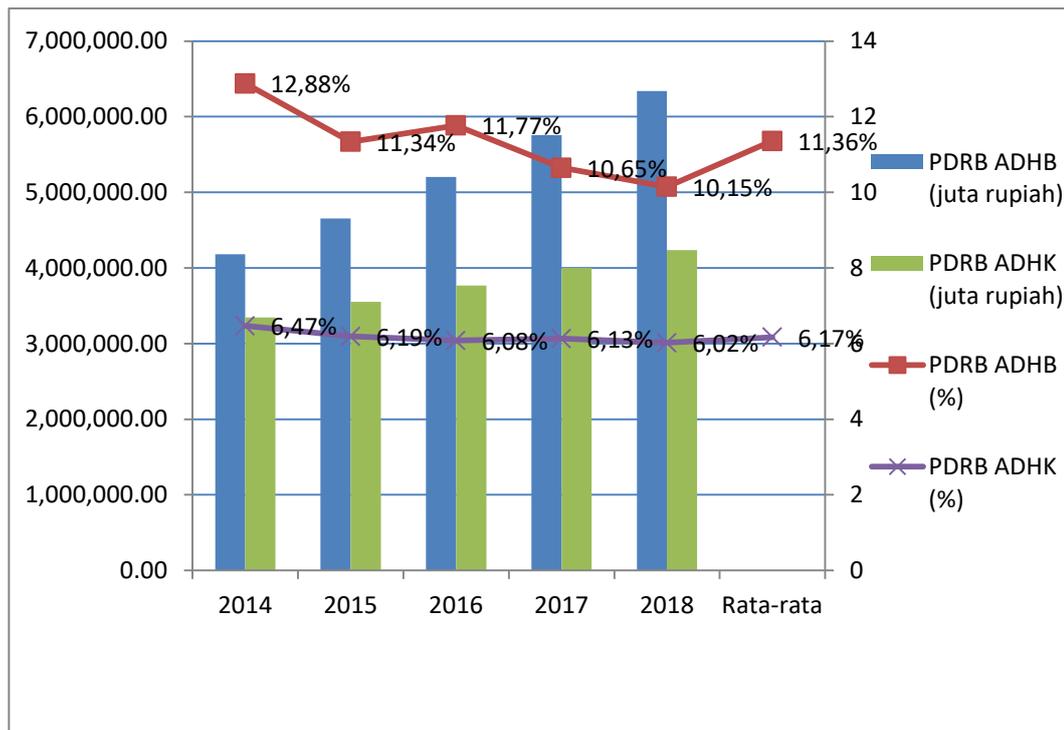
berhasil dikembangkan akan melebihi perannya di sektor migas (migas) dan industri lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pariwisata sebagai pendapatan daerah antara lain jumlah objek wisata yang disediakan, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, dan pendapatan per kapita.

Payakumbuh ialah salah satu daerah yang berada di wilayah provinsi Sumatera Barat yang memiliki pemandangan alam dan tempat wisata yang potensial. Payakumbuh terletak di jalur lintas Sumatera, dan karena letaknya yang strategis menarik banyak wisatawan. Ketertarikan wisatawan untuk menghabiskan waktu di Payakumbuh berdampak positif bagi perkembangan bisnis pariwisata, bahkan dalam sehari. Oleh karena itu, pariwisata merupakan industri jasa yang sangat penting.

Payakumbuh memiliki banyak obyek wisata alam, budaya dan gastronomi yang menarik. Ngalau indah merupakan tempat wisata yang terkenal sangat indah di Payakumbuh, dan lebih banyak lagi wisata budaya dan gastronomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pariwisata Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi Payakumbuh cukup baik, dan berdampak pada peningkatan PDRB, karena kegiatan perjalanan menuju objek wisata akan memberikan keuntungan bagi perekonomian daerah yang dikunjungi. Kenaikan PDRB akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan secara tidak langsung mempengaruhi wisatawan yang akan melakukan kegiatan pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa beberapa bidang usaha mempunyai prospek yang baik bagi PDRB. PDRB ialah suatu parameter yang

penting untuk melihat dan mengetahui bagaimana alur perkembangan situasi ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, yang ditinjau dari ADHB atau Atas dasar harga berlaku ataupun berdasarkan ADHK atau Atas Dasar Harga Konstan. Perubahan PDRB berdasarkan harga berlaku ataupun harga konstan pada tahun 2010 di kota Payakumbuh dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 ditampilkan dalam tabel dibawah ini :



Sumber : Kota Payakumbuh dalam Angka 2015-2019

Gambar 1.1

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Payakumbuh ADHB dan ADHK Tahun 2014-2018

Perkembangan PDRB Payakumbuh, PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK selama 2013-2018 meningkat dari tahun ke tahun. Nilai PDRB-ADHB kota

Payakumbuh hanya 3,7 triliun rupiah pada tahun 2013, kemudian angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 6,34 triliun rupiah di tahun 2018, yang berarti pada harga saat ini diketahui besarnya jumlah pertumbuhan PDRB di kurun waktu 2013 hingga 2018 memiliki rata-rata 11,36% dalam setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2013 hingga 2018, fakta membuktikan bahwa berdasarkan harga saat ini, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 paling tinggi yaitu sebesar 12,88%. Pada harga saat ini, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 tergolong tinggi yang menandakan bahwasanya kapasitas dari pengelolaan untuk sumber daya ekonomi di wilayah kota payakumbuh sudah cukup baik, namun untuk laju pertumbuhan ekonomi paling rendah ditinjau atas dasar harga berlaku ialah di tahun 2018 sebesar 10,15%.

Masa otonomi daerah mengalokasikan tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar terhadap pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan dan menetapkan prioritas daerah. Era otonomi hanyalah untuk memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada suatu daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Menurut UU No. 23 tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah, pendapatan daerah ialah semua hak yang dimiliki oleh daerah dan diakui sebagai suatu hal untuk menambah nilai atas kekayaan bersih dalam kurun waktu anggaran yang ditentukan, pendapatan suatu daerah bersumber dari dana perimbangan daerah dan pusat, serta bersumber dari penghasilan daerah itu sendiri dan hal lain berupa pendapatan yang sah.

Menurut Halim dan Iqbal (2012) Perpajakan harus memenuhi syarat keadilan, kepastian, kelayakan, efisiensi dan ketepatan sebagai sumber pendapatan daerah. Sedangkan Mardiasmo (2011) mengatakan iuran yang harus

dipenuhi serta didapatkan dari individu atau lembaga terhadap daerah. Tidak adanya keringan yang setara, yang ditentukan berdasarkan aturan dari perundang undangan yang mendanai pengadaan kegiatan pemerintah serta pembangunan di daerah.

Faktor yang terkait dengan kenaikan pajak daerah adalah kuantitas dari hotel. Keberadaan hotel di Kota Payakumbuh telah memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah terkait dengan penghasilan dari pajak hotel. Hal lain dapat berpengaruh terhadap perpajakan daerah ialah kunjungan wisatawan. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia, pengunjung adalah setiap orang yang menunjukkan bahwa dengan alasan apapun mereka mengunjungi negara selain negara asalnya, namun tidak menerima pembayaran pekerjaan dari negara yang mereka kunjungi (Antari, 2013).

Domanski dan Gwosdz (2010) menunjukkan intensitas wisatawan dapat memiliki multiplier effect. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat multiplier effect industri pariwisata yaitu pertumbuhan bisnis perpajakan daerah dapat ditingkatkan yang selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah atau memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Menurut Domanski dan Gwosdz tentang konsep multiplier effect, pajak yang dipungut dari lokasi wisata di Payakumbuh sehingga dapat dimanfaatkan untuk membenahi infrastruktur daerah atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Industri pariwisata Payakumbuh secara tidak langsung akan berdampak signifikan bagi kemakmuran penduduk melalui perpajakan daerah, dan akan terus mengembangkan infrastruktur serta fasilitas umum. Artinya, jika industri pariwisata di payakumbuh berkembang dengan baik sehingga meningkat

pula pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu adanya peningkatan alokasi dana yang diterima oleh pemerintah agar dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan mendorong pembangunan daerah, begitu pula sebaliknya.

Faktor lain bisa berdampak terhadap pajak suatu daerah ialah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita merupakan pendapatan dari daerah yang dirata-ratakan dalam kurun waktu yang ditentukan (Sukirno, 2004). Pendapatan perkapita dapat pula dikatakan sebagai penjumlahan untuk nilai barang dan jasa yang dipergunakan oleh masyarakat suatu daerah dalam kurun waktu yang ditentukan. Pendapatan per kapita dihitung dengan jumlah pendapatan seluruh wilayah negara di waktu tertentu dan membaginya dengan banyaknya total masyarakat di seluruh wilayah tersebut dengan kesesuaian waktu yang sama. Pendapatan perkapita suatu negara dapat mencerminkan kemakmuran masyarakatnya.

Pemkot Payakumbuh harus mampu menggali dan mengelola potensi industri pariwisatanya melalui terobosan-terobosan baru guna mencari pendanaan untuk mendanai belanja daerah, karena pariwisata ialah salah satu industri yang menggantungkan dan meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan kualitas Payakumbuh dan penambahan objek wisata baru dapat menjadi salah satu terobosan dalam upaya untuk melakukan peningkatan intensitas pengunjung dari wilayah domestic dan internasional, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, khususnya pengeluaran wisatawan selama berada di Payakumbuh akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar untuk memberikan pembangunan di masa depan. Dari fenomena yang telah dijabarkan diatas

sehingga penulis menentukan judul penelitian ini yaitu Analisis Pengaruh Jumlah PDRB, Jumlah Wisatawan dan Jumlah Objek Wisata terhadap Pajak Daerah di Kota Payakumbuh.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan retribusi obyek wisata yang diterima di daerah merupakan suatu indikator yang diterapkan untuk mengamati dampak yang dihasilkan oleh pariwisata terhadap perekonomian suatu daerah, dan merupakan pengukur tingkat perekonomian suatu daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan daerah, pendapatan resmi, dan penghasilan asli daerah yang diakui ialah pendapatan dari objek pariwisata yang akan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Sumatera Barat mempunyai kapasitas untuk berkembang yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya lokasi wisata di Payakumbuh dan ragam wisata alam, serta kulinernya. Namun dengan peluang perkembangan yang tinggi tersebut masih belum dapat dimaksimalkan yang dapat pula meningkatkan pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, dirasa perlu diadakan penelitian yang berhubungan dengan analisis pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita terhadap pajak daerah kota Payakumbuh yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka ditentukan rumusan masalah penelitian ini adalah:

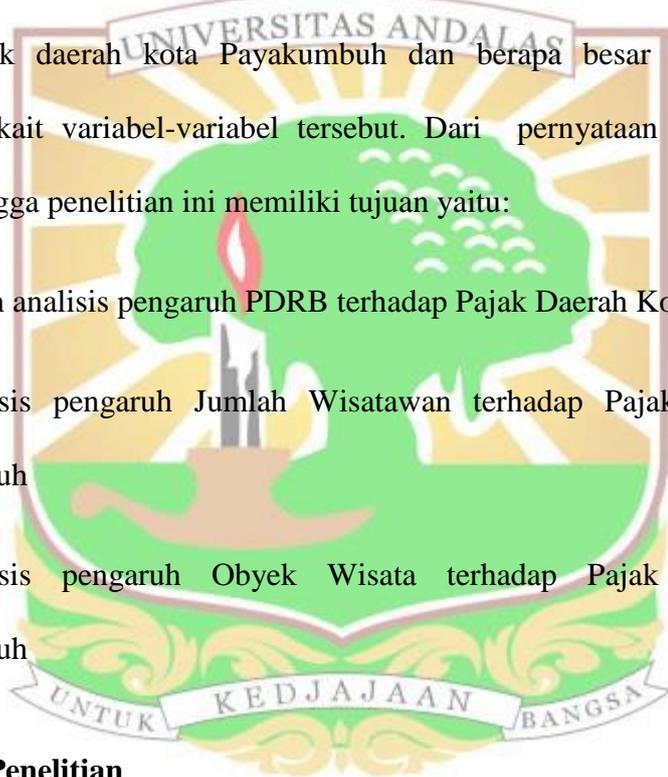
1. Bagaimana pengaruh jumlah PDRB terhadap Pajak daerah di kota Payakumbuh ?

2. Bagaimana pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pajak Daerah di kota Payakumbuh ?
3. Bagaimana pengaruh Obyek Wisata terhadap Pajak daerah di kota Payakumbuh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Melakukan analisis pengaruh PDRB, jumlah wisatawan, obyek wisata terhadap Pajak daerah kota Payakumbuh dan berapa besar pengaruh yang dihasilkan terkait variabel-variabel tersebut. Dari pernyataan terkait rumusan masalah sehingga penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Melakukan analisis pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah Kota Payakumbuh
2. Menganalisis pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pajak Daerah Kota Payakumbuh
3. Menganalisis pengaruh Obyek Wisata terhadap Pajak Daerah Kota Payakumbuh



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bermanfaat sebagai rujukan untuk mengambil kebijakan yang optimal sehingga terjadinya peningkatan pendapatan bagi pemerintah daerah sektor pariwisata oleh pemerintah setempat.

2. Hasil dari penelitian bermanfaat untuk bahan rujukan untuk penelitian lain yang terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang diterapkan dalam penelitian terdapat lima bab, yang terdiri dari:

BAB 1 : Pendahuluan

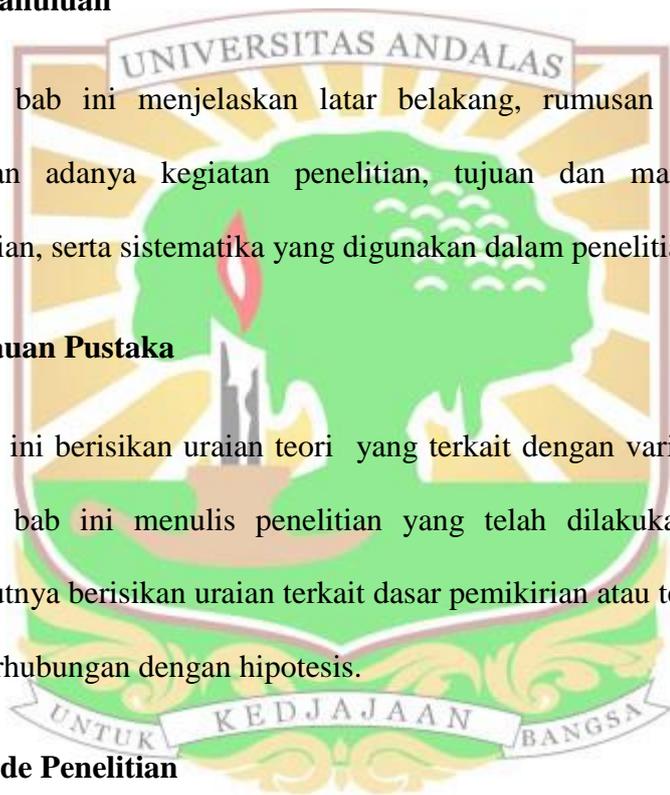
Dalam bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah untuk landasan adanya kegiatan penelitian, tujuan dan manfaat diadakan penelitian, serta sistematika yang digunakan dalam penelitian.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisikan uraian teori yang terkait dengan variabel penelitian. Dalam bab ini menulis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya berisikan uraian terkait dasar pemikiran atau teori yang sesuai dan berhubungan dengan hipotesis.

BAB 3 : Metode Penelitian

Bagian ini memaparkan terkait penelitian dengan jenis pendekatan yang digunakan, identifikasi masalah serta definisi operasional dari penelitian, jenis dan sumber data, prosedur yang digunakan untuk melakukan mendapatkan data serta uji statistic yang diterapkan untuk mendapatkan hasil penelitian.



BAB 4 : Gambaran umum dan variable penelitian

Bagian ini menjabarkan terkait kondisi umum daerah yang menjadi lokasi penelitian.

BAB 5 : Hasil dan pembahasan

Bagian ini berisikan pembahasan dari hasil dan analisis data, menjelaskan perkiraan hasil penelitian yang dilakukan

BAB 6 : Kesimpulan dan Saran

Bagian ini akan dibuat simpulan penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh dari pembahasan dan saran diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

